i, 4 DESEMBER 2015
JIMAWAL

WACANA

HARIAN BERNAS

Kemesraan Sejarah Indonesia-Papua

Oleh: Heri Priyatmoko

Ada sepotong kisah menarik tentang kaum nasionalis yang dibuang di Manokwari dan Boven Digoel di wilayah Papua. Tak sedikit dari kita geleng kepala ditanya soal satu ini. Berangkat dari sepotong pertanyaan, benarkah Papua tidak pernah jadi bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia di masa silam?

BERITA aktual, aparat kepolisian menangkap 111 pendemo dari Papua. Suasana Bundaran HI pada waktu itu memang mencekam. Demonstrasi di Bundaran HI digelar oleh massa asal Papua dibubarkan oleh polisi. Sekitar 300 pendemo hendak melakukan long march ke Istana Negara dalam rangka Hari Ekspresi Identitas Papua. Selama ini, timbul kesan bahwa Indonesia seakan terpisah dengan Papua secara historis. Indonesia tidak henti-hentinya mengeksploitasi sumber daya alam di sana. Ketegangan demi ketegangan pun tak terelakkan.

Baiklah, mari kita membuka laci sejarah Indonesia. Ada sepotong kisah menarik tentang kaum nasionalis yang dibuang di Manokwari dan Boven Digoel di wilayah Papua. Tak sedikit dari kita geleng kepala ditanya soal satu ini. Berangkat dari sepotong pertanyaan, benarkah Papua tidak pernah jadi bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia di masa silam?

Terlalu lama kita keliru melihat serta memperlakukan Papua secara berbeda lantaran perbedaan kultural dan riwayat integrasinya dalam konteks geopolitik Indonesia. Buku berjudul "Jejak Kebangsaan: Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel" mencatat bahwa kita punya hutang budi dengan penduduk setempat. Kaum pergerakan nasional yang dibuang ke Manokwari dan Boven Digoel bertahan hidup di Papua dengan bantuan masyarakat lokal.

Memberi bantuan dan membangun hubungan harmonis merupakan tindakan yang "diharamkan" oleh pemerintah Walanda kala itu. Namun, mereka berani ambil risiko demi tujuan politik nasionalisme dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Perjuangan melawan kolonialisme yang sejalan dengan lahir dan terbentuknya nasionalisme Indonesia pada hakikatnya tidak mengenal batas geografis maupun perbedaan suku, agama, maupun ideologi.

Sebagai contoh, Haji Misbach dari Kota Solo yang sohor sebagai "haji merah" lantaran mengusung ideologi Islam-komunis, para "pemberontak" 1926-1927 dari Banten dan Pantai Barat Sumatera, dan Moh Hatta dan Sutan Syahrir, semuanya dirangkul oleh spirit yang sama, yaitu memerangi kolonialisme Belanda. Relasi mereka dengan warga Papua memang bukan sebuah jejak sejarah yang gamblang, sebab sebagai tahanan politik, tentu saja gerak langkah mereka dibatasi dan dikebiri.

Beruntung terdapat beberapa bukti sejarah yang berharga guna melongok jejak yang temaram itu. Antara lain, aneka tulisan Haji Misbach di Medan Moeslimin dan cerita tutur Chalid Salim tentang suku-suku asli di sekitar Tanah Merah (Boven Digoel) juga memperlihatkan adanya interaksi para tahanan politik di Boven Digoel dengan warga setempat.

Langgeng Sulistyo Budi (2013) menginformasikan bahwa pergaulan itu dimulai manakala penduduk asli mengunjungi kamp. Untuk mengunjungi tempat tahanan itu, masyarakat asli Boven Digoel, baik laki-laki maupun perempuan, harus menempuh perjalanan sekitar 30-40 kilometer. Gubug mereka dibangun di dekat kamp Tanah Merah. Pada tahap awal mereka hanya memperhatikan kehidupan di dalam kamp, kemudian lambat laun mereka mau bekerja sebagai pembantu rumah dan tukang kebun di beberapa keluarga tahanan. Mereka tak memperoleh gaji berujud uang, melainkan upahnya pakaian, tembakau dan bahan makanan, sebab mereka detik itu belum mengenal mata uang.

Dengan terjalinnya relasi ini, warga sekitar yang juga dianggap oleh kolonial Belanda sebagai "rakyat negeri jajahan", mulai belajar berpakaian, cara makan dan berbahasa Melayu. Kesamaan nasib inilah yang mempersatukan mereka dengan Indonesia, sehingga Bung Karno begitu lantang memproklamasikan wilayah Indonesia "dari Sabang sampai Merauke", bahkan sukses mendorong sebuah perjuangan untuk pembebasan Irian Barat tahun 1962.

Tulisan ini untuk mengingatkan kepada kita pertautan sejarah antara Papua dan Indonesia yang kerab dilupakan. Keliru bila hanya menafsirkan masalah Papua dalam konteks politik hari ini terfokus pada masalah integrasi via Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 yang problematik dan dianggap tidak sah itu. Tak ada salahnya kita menyambung benang sejarah hubungan mesra yang lama (di) putus ini. Juga, merenungkan jalinan kisah Papua-Indonesia dari perspektif sejarah yang memuat nilai-nilai persamaan nasib dan perjuangan melawan kolonialisme. ***

Heri Priyatmoko, *Dosen Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*